



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARI WIWOHO
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 279598

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.985.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/60 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 950.000.000
2. Tanah Seluas 59 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 615.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 90.000.000

1. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 40.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 997.421.612

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.112.921.612

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.112.921.612

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.